

KINERJA USAHA PENGGILINGAN PADI, STUDI KASUS PADA TIGA USAHA PENGGILINGAN PADI DI CIANJUR, JAWA BARAT

Tursina Andita Putri¹, Nunung Kusnadi², dan Dwi Rachmina²

¹Mahasiswa Program Studi Magister Sains Mayor Agribisnis, Pascasarjana Institut Pertanian Bogor

²Departemen Agribisnis, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor

e-mail : ¹tursina.anditaputri@yahoo.com

ABSTRACT

It is assumed that government policy to protect farmer's income by maintaining a high grain price that leads to a high production cost of rice milling combine with a policy that keeping the rice at relatively low price to protect consumer, causes a low profit of rice milling business. To prove it, multiple case study was conducted to portray the performance of rice milling business by identifying and analyzing the cost and revenue structure of rice milling business. In this study, three types (maklon, non maklon, and combination of both) of rice milling business were selected. The biggest cost of rice milling business is the cost of purchasing grain, while the main revenue derived from rice. The rice milling business can still tolerate a 9.81 percent increase of the grain price. It is equal to the maximum price of grain Rp 4281,93 per kg GKP. While the decline in the price of rice that can still be tolerated is of 10.34 percent that's referred to a minimum price of rice Rp 8120.00 per kg. The largest proportion of the rice milling business profit is not derived from rice as main product but from the by product such as rice bran, rice husk, broken rice, and groats. Type of business, price of inputs and outputs, and by-product management would be the key variables that determine the business performance. These variables should be more studied in the future research.

Keywords: Multiple Case Study, Performance, Rice Milling Business

PENDAHULUAN

Beras merupakan salah satu komoditi pangan yang memiliki peran strategis baik dari sisi produsen maupun konsumen. Dari sisi produsen diketahui produksi padi nasional pada tahun 2012 mencapai 68,59 juta ton setara dengan 41,16 juta ton beras. Selain itu, dari sisi konsumen diketahui bahwa konsumsi beras rata-rata penduduk Indonesia mencapai 139 kg per kapita pertahun. Jumlah tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan dengan negara lainnya, seperti Thailand dan Malaysia. Rata-rata konsumsi beras di Thailand adalah 103 kg per kapita pertahun dan Malaysia hanya 77 kg per kapita pertahun (USDA, 2012).

Sistem agribisnis beras melibatkan sejumlah subsistem, mulai dari subsistem penyedia input sampai dengan subsistem pemasaran. Industri penggilingan padi merupakan salah satu subsistem agribisnis yang berperan penting mengolah gabah

sebagai input menjadi beras dan *side product* lainnya. Sebagai industri perantara maka industri penggilingan padi berperan penting sebagai mata rantai suplai beras nasional.

Berdasarkan tipenya maka usaha penggilingan padi dapat digolongkan kepada tiga tipe yaitu maklon, non maklon, dan gabungan. Istilah lain yang digunakan oleh Winarno (2007) adalah *rice milling commercial* untuk usaha penggilingan padi dengan tipe maklon dan *service mills* untuk usaha penggilingan padi dengan tipe maklon. Usaha penggilingan padi tipe maklon adalah usaha penggilingan padi yang menyediakan jasa penggilingan padi bagi petani maupun pedagang pengumpul. Penggilingan padi tipe non maklon adalah usaha dimana pengusaha penggilingan menggunakan mesin penggilingan untuk mengolah gabah miliknya sendiri. Oleh sebab itu, pengusaha penggilingan padi biasanya juga melakukan jual beli gabah dan beras.

Badan Pusat Statistik 2012 menyebutkan bahwa industri penggilingan padi Indonesia masih didominasi oleh usaha penggilingan padi skala kecil, yaitu mencapai 94,13 persen. Usaha penggilingan padi skala sedang dan besar hanya mencapai 4,74 persen dan 1,14 persen. Umumnya unit usaha penggilingan padi skala kecil merupakan investasi pada tahun 1960-an sampai awal 1980-an (Sawit, 2011).

Usaha penggilingan padi skala kecil pada umumnya hanya terdiri dari mesin pemecah kulit (*husker*) dan mesin penyosoh beras (*polisher*) sehingga rendemen beras yang dihasilkan rendah dan mutu berasnya kurang baik. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Balai Besar Pengembangan Mekanisasi pertanian tahun 2003 menunjukkan bahwa penggilingan padi skala kecil mempunyai rendemen rata-rata sebesar 55,71% dengan mutu beras yang dihasilkan adalah 74,25% beras kepala dan beras patah dan menir sebesar 15%. Akan tetapi, apabila ada penambahan mesin maka menyebabkan peningkatan rendemen giling. Penambahan mesin *separator* (pemisah beras pecah kulit dengan gabah yang belum terkupas) akan meningkatkan rendemen sebesar 0,94%, sedangkan penambahan mesin *cleaner* (pembersih gabah) akan meningkatkan rendemen sebesar 0,95%.

Secara umum, rendemen giling usaha penggilingan padi dari tahun ke tahun terus mengalami penurunan secara kuantitatif dari 70 persen pada akhir tahun 70an menjadi 65 persen pada tahun 1985, dan 63,2 persen pada tahun 1999. Rendemen tersebut terus menurun bahkan saat ini rendemen giling hanya mencapai maksimal 60 persen (Sawit, 2011). Penurunan rendemen giling juga dapat dipengaruhi oleh penggunaan mesin penggilingan padi yang telah berumur tua. Tiga puluh dua persen mesin penggilingan padi yang digunakan diduga telah berumur lebih dari 15 tahun (Thahir, 2010).

Hampir seluruh usaha penggilingan padi di Indonesia dikelola oleh pihak swasta. Peran swasta dalam pengadaan beras melalui usaha penggilingan padi di Indonesia sangatlah

besar. Diperkirakan sekitar 93 persen ketersediaan beras di pasar merupakan akibat beroperasinya unit penggilingan padi swasta (Patiwiri 2004). Namun, ada juga usaha penggilingan padi yang bekerjasama dengan Bulog dalam memproduksi beras. Operasional kegiatan usaha penggilingan padi yang bekerja sama dengan Bulog kemudian akan diatur pada perjanjian kerjasama.

Unit usaha penggilingan padi pada tahun 2008 diketahui telah mencapai 108.512 unit dengan kapasitas kumulatif diperkirakan 109,5 juta ton per tahun (Ditjen P2HP, 2009 dalam Thahir, 2010). Produksi padi Nasional hanya 60,3 juta ton pada tahun 2008, setara dengan faktor konversi dari gabah ke beras 65 persen. Hal ini menyebabkan banyak usaha penggilingan padi bekerja di bawah kapasitas terpasang. Fenomena ini telah terjadi sejak tahun 2003 sehingga diperkirakan hanya 40 persen unit penggilingan padi yang beroperasi dengan kapasitas penuh (Thahir, 2010).

Banyaknya unit penggilingan padi bekerja di bawah kapasitas terpasang, disebabkan karena distribusi panen yang tidak merata. Distribusi panen tidak merata menyebabkan volume gabah yang tersedia tidak mencukupi untuk memenuhi kapasitas maksimum usaha penggilingan padi. Thahir (2010) menyebutkan bahwa sejak tahun 2003 diperkirakan hanya 40 persen unit penggilingan padi yang beroperasi dengan kapasitas penuh.

Tingkat kehilangan hasil yang tinggi pada sistem pengolahan padi di Indonesia mengindikasikan buruknya penanganan pengelolaan pascapanen. Diketahui bahwa tingkat kehilangan pascapanen mencapai 13,35 persen. Usaha penggilingan padi berkontribusi sebesar 4,51 persen terhadap tingkat kehilangan hasil pascapanen. Jumlah ini setara dengan 12,99 triliun rupiah dengan asumsi produksi padi nasional Tahun 2012 sebesar 68.59 juta ton, tingkat rendemen giling sebesar 60 persen, dan harga beras Rp 7500/Kg.

Berbagai masalah tersebut kemudian berdampak pada rendahnya tingkat efisiensi teknis usaha penggilingan padi. Efisiensi teknis usaha penggilingan padi di Indonesia dengan studi kasus di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat adalah 60,64 persen (Apriande, 2013). Skor efisiensi tersebut jauh dibandingkan dengan efisiensi di Vietnam dan Thailand, yaitu masing-masing mencapai 91 persen sedangkan dan 87 persen (Wongkeawchan *et al*, 2000).

Kondisi tersebut kemudian diperburuk dengan adanya kebijakan pemerintah. Pemerintah menerapkan kebijakan harga beli gabah dan beras atau yang biasa dikenal dengan HPP (Harga Pembelian Pemerintah). Kebijakan HPP gabah bertujuan untuk melindungi petani dari rendahnya harga gabah yang diterima petani terutama pada saat panen raya. Berdasarkan Inpres Nomor 3 Tahun 2012 diketahui HPP untuk gabah kering panen (GKP) yaitu sebesar Rp 3.300 per kg di petani atau Rp 3.350 per kg di penggilingan. Sedangkan Harga pembelian gabah kering giling (GKG) adalah Rp 4.150 per kg di penggilingan atau Rp 4.200 per kg di gudang Perum Bulog. Akan tetapi berdasarkan data BPS (2012), harga jual GKP Rp 4.232 per kg dan GKG mencapai Rp 4.755 per kg. Hal ini membuktikan bahwa harga gabah yang ditawarkan oleh petani kepada pedagang pengumpul maupun kepada usaha penggilingan padi lebih tinggi dibandingkan HPP yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Upaya pemerintah untuk melindungi petani kemudian akan menyebabkan tingginya biaya yang harus dikeluarkan oleh usaha penggilingan padi untuk memperoleh input produksi.

Di sisi lain, pemerintah juga menetapkan kebijakan harga beras. Kebijakan harga beras merupakan upaya bagi pemerintah untuk melindungi konsumen sehingga mendapatkan beras dengan harga yang relatif murah dan terjangkau. Melalui Inpres yang sama ditetapkan HPP beras sebesar Rp 6.600 per kg di Bulog. Dampak kebijakan ini adalah harga beras yang dijual kepada Bulog hanya

dihargai maksimal sesuai dengan HPP beras yang berlaku.

Kebijakan pemerintah seringkali di-upayakan untuk melindungi petani sebagai produsen padi dan konsumen beras. Akan tetapi, kebijakan tersebut justru akan menyebabkan usaha penggilingan padi mengalami posisi yang sulit dimana harga gabah sebagai input produksi selalu diupayakan tinggi sedangkan harga beras sebagai output utama ditekan agar terjangkau oleh konsumen. Namun, berdasarkan data penyebaran usaha penggilingan padi, dapat diketahui bahwa masih banyak usaha penggilingan padi di Indonesia yang mampu bertahan dan bahkan mengembangkan usahanya. Hal tersebut tentu dipengaruhi oleh manajemen usaha yang dilakukan oleh pengelola masing-masing usaha penggilingan padi. Oleh sebab itu, penting untuk mengetahui atau mempelajari kinerja usaha penggilingan padi.

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah dibahas sebelumnya, maka tujuan penelitian ini antara lain adalah (1) mengidentifikasi struktur biaya dan penerimaan usaha penggilingan padi; (2) menghitung pendapatan usaha penggilingan padi; (3) mengidentifikasi variabel-variabel kunci yang memengaruhi kinerja usaha penggilingan padi.

METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan pada bulan Oktober 2012 sampai Januari 2013. Objek penelitian ini adalah tiga usaha penggilingan padi berdasarkan tipenya, yaitu maklon, non maklon, dan gabungan di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat.

Penelitian ini dilakukan dengan metode *multiple case study*. Melalui metode *multiple case study* diharapkan peneliti bisa menggambarkan secara rinci dan dapat membandingkan masing-masing objek penelitian. Pada metode ini hasil yang diperoleh hanya menggambarkan usaha yang menjadi objek penelitian atau dengan arti lain

hasil penelitian tidak dapat digeneralisasikan untuk cakupan yang lebih luas. Oleh sebab itu, untuk menjaga kerahasiaan identitas pelaku usaha dan usahanya maka nama perusahaan penggilingan padi dirahasiakan.

Analisis kuantitatif digunakan untuk menjelaskan kinerja usaha penggilingan padi. Pada penelitian ini, kinerja usaha penggilingan padi diukur berdasarkan analisis pendapatan dan efisiensi usaha. Pendapatan diketahui dengan terlebih dahulu mengidentifikasi struktur penerimaan dan biaya masing-masing usaha penggilingan padi. Volume dan harga (input dan output) yang digunakan pada penelitian ini adalah volume dan harga rata-rata yang berlaku pada saat penelitian. Sedangkan, efisiensi usaha diketahui dengan menggunakan ukuran rasio R/C.

Analisis sensitivitas juga digunakan pada penelitian ini. Analisis ini berguna untuk mengukur tingkat kenaikan harga gabah dan harga beras yang dapat diterima oleh pelaku usaha agar usahanya tetap berada di titik BEP (*Break Even Point*) atau tidak mengalami kerugian. Ini dapat menjadi rekomendasi bagi pembuat kebijakan dalam mengontrol harga gabah dan beras yang berlaku di pasar sehingga tidak merugikan pihak pengusaha penggilingan padi. Analisis sensitivitas ini hanya dilakukan pada usaha penggilingan padi tipe non maklon.

HASIL DAN PEMBAHASAN

AKTIVITAS USAHA DAN KAPASITAS PRODUKSI

Aktivitas produksi pada usaha tipe maklon dilakukan setiap hari, kecuali hari Jumat dengan waktu produksi selama tiga jam per hari. Dalam jangka waktu tersebut, usaha ini dapat melayani beberapa pelanggan dengan jumlah produksi maksimal 700 kg per hari. Kapasitas produksi mesin penggilingan padi yang digunakan dapat mencapai 1500 kg per jam sehingga diketahui bahwa usaha ini

mengalami *idle capacity*. Hal ini terjadi karena beberapa hal, seperti terbatasnya jumlah pelanggan yang menggunakan jasa usaha penggilingan padi. Selain itu, pelanggan yang menggunakan jasa penggilingan tersebut adalah skala rumah tangga sehingga jumlah gabah yang akan digiling tidak banyak.

Aktivitas utama usaha tipe non maklon adalah melakukan pengolahan gabah menjadi beras dan produk samping, dimana input dan output usaha dimiliki oleh pemilik usaha. Oleh sebab itu, usaha ini memiliki aktivitas pembelian gabah dan penjualan beras. Usaha penggilingan padi tipe gabungan juga melakukan aktivitas serupa dengan usaha tipe non maklon. Namun, usaha tipe maklon juga menyediakan jasa penggilingan padi bagi petani dan pedagang pengumpul.

Aktivitas usaha tipe non maklon dan gabungan juga dilakukan setiap hari, kecuali hari Jumat. Namun jam kerja kedua usaha ini lebih lama dibandingkan dengan usaha tipe maklon, yaitu tujuh jam per hari. Usaha tipe maklon dapat menghasilkan beras sebanyak 10 ton per hari dengan rendemen rata-rata 50 persen. Usaha tipe gabungan hanya dapat menghasilkan 4,5 ton beras per hari, dimana 3,2 ton dihasilkan dari gabah pribadi sedangkan 1,3 ton beras lainnya berasal dari aktivitas jasa penggilingan padi.

STRUKTUR BIAYA

Aktivitas yang dilakukan oleh usaha penggilingan padi dalam tiap tahapannya memiliki biaya yang harus ditanggung oleh usaha penggilingan. Biaya tersebut terbagi atas biaya tetap dan biaya variabel. Biaya tetap dikeluarkan oleh penggilingan meliputi biaya penyusutan mesin dan peralatan, biaya tenaga kerja tetap, biaya pajak, *maintainance* mesin dan peralatan, biaya konsumsi pekerja, dan beban bunga atas pinjaman yang diperoleh. Biaya variabel terdiri atas biaya pembelian GKP, biaya pengeringan, biaya penggilingan, biaya pengolahan, dan biaya penjualan.

Tabel 1. Biaya Masing-Masing Usaha Penggilingan Padi Per Ton Beras yang Dihasilkan

Komponen Biaya	Biaya perusahaan					
	Maklon	%	Non Maklon	%	Gabungan	%
Biaya variabel						
Pengadaan GKP	-	-	7.724.000	92,32	6.016.000	91,87
Pengeringan	-	-	139.800	1,67	87.500	1,34
Penggilingan	23.657	19,13	50.769	0,61	70.000	1,07
Pengolahan beras	-	-	18.000	0,22	40.000	0,61
Pengolahan <i>side product</i>	-	-	68.883	0,82	-	-
Penjualan	-	-	133.465	1,60	267.563	4,09
Total Biaya Variabel	23.657	19,13	8.134.917	97,24	6.481.063	98,97
Biaya tetap						
Non penyusutan	94.003	76,02	206.282	2,47	53.373	0,82
Penyusutan	6.003	4,85	24.913	0,33	14.097	0,22
Total Biaya Tetap	100.006	80,87	231.195	2,76	67.470	0,10
Total Biaya	123.663	100,00	8.366.112	100,00	6.548.533	100,00

^a Jumlah biaya dalam rupiah (Rp)

Tabel 1 menunjukkan ringkasan dari komponen biaya yang dikorbankan untuk aktivitas usaha penggilingan padi masing-masing usaha penggilingan padi. Diketahui bahwa komponen biaya pada usaha tipe non maklon lebih banyak dibandingkan dengan komponen biaya pada usaha tipe maklon dan gabungan. Hal ini disebabkan karena aktivitas usaha yang dilakukan oleh usaha tipe non maklon lebih banyak.

Total biaya yang dikorbankan oleh usaha tipe maklon untuk produksi satu ton beras, yaitu Rp 123.657,14 dengan persentase biaya tetap mencapai 80,87 persen dari keseluruhan biaya. Komponen biaya tetap pada usaha tipe maklon hanya terdiri atas biaya tenaga kerja, biaya pajak bumi dan bangunan, serta biaya *maintanance* mesin. Diketahui bahwa usaha tipe maklon hanya melakukan aktivitas penggilingan gabah menjadi beras. Oleh sebab itu, biaya variabel yang dikeluarkan hanya terdiri atas biaya operasional aktivitas penggilingan, seperti biaya pembelian bahan bakar dan upah tenaga kerja.

Komponen biaya tetap pada usaha penggilingan padi tipe gabungan juga terdapat pada usaha tipe non maklon. Biaya tetap per ton beras yang dihasilkan pada usaha tipe non maklon mencapai empat kali

lipat dari biaya tetap usaha tipe gabungan Hal ini dikarenakan adanya komponen biaya tenaga kerja tetap bagi lima orang tenaga kerja pada usaha tipe non maklon. Biaya tetap pada usaha tipe non maklon adalah 2,25 persen dari keseluruhan biaya yang dikorbankan. Sedangkan biaya tetap pada usaha tipe gabungan hanya sebesar 1,03 persen dari total biaya.

Penyebab tingginya biaya tetap usaha penggilingan padi tipe non maklon juga disebabkan oleh tingginya biaya penyusutan pada usaha tipe ini dibandingkan dengan kedua tipe lainnya. Hal ini disebabkan karena usaha penggilingan tipe non maklon memiliki konfigurasi mesin yang lebih kompleks, yaitu oven - *cleaner* - *husker* - *husker* - *polisher* - *polisher* - *grader*. Sedangkan, usaha peng gilingan padi tipe maklon hanya memiliki konfigurasi mesin yang sederhana, yaitu *husker* - *polisher*. Usaha penggilingan padi tipe gabungan juga memiliki konfigurasi mesin yang serupa dengan tipe maklon, akan tetapi usaha ini memiliki mesin *husker* dan *polisher* masing-masing dua unit. Selain itu, aset dari usaha tipe non maklon juga lebih banyak dibandingkan kedua tipe usaha lainnya, seperti bangunan pabrik yang lebih luas, kendaraan operasional yang lebih banyak,

peralatan yang lebih beragam, dan sebagainya.

Angka penyusutan yang relatif kecil disebabkan karena umur ekonomis dari masing-masing mesin dan peralatan, maupun aset yang digunakan relatif tinggi. Misalnya pada usaha tipe non maklon, mesin *husker* dan *polisher* dapat digunakan dalam kurun waktu 20 tahun. Begitu pula dengan peralatan lainnya, seperti timbangan dapat dipakai mencapai kurun waktu 10 tahun. Akan tetapi, ada juga beberapa mesin dan peralatan yang hanya dapat dipakai dalam kurun waktu 2 sampai 5 tahun saja. Hal yang sama juga terjadi pada usaha penggilingan padi tipe maklon dan gabungan.

Lamanya periode pemakaian mesin dan peralatan tentu didukung oleh *maintanance* yang baik. Oleh sebab itu, biaya *maintanance* pada usaha penggilingan padi juga cukup tinggi. Pada usaha penggilingan padi tipe non maklon, biaya *maintanance* mencapai 53.88 persen dari total biaya tetap. Sedangkan pada usaha penggilingan padi tipe maklon dan gabungan mencapai 22.46 persen dan 24.99 persen dari total biaya tetap.

Usaha tipe non maklon memiliki komponen biaya variabel yang terdiri atas biaya pembelian gabah, biaya pengeringan, biaya penggilingan, biaya pengolahan beras maupun produk sampingan, serta biaya penjualan output. Usaha tipe gabungan juga memiliki komponen biaya variabel seperti pada usaha tipe non maklon. Namun, usaha tipe gabungan tidak melakukan aktivitas pengolahan produk samping sehingga pada usaha ini tidak ada komponen biaya pengolahan produk samping. Komponen biaya variabel dengan nilai terbesar adalah biaya pengadaan gabah atau GKP yang mencapai 93,42 persen untuk usaha tipe non maklon dan 92,82 persen untuk usaha tipe gabungan dari total biaya variabel.

Tidak hanya biaya tetap dan biaya variabel, usaha tipe non maklon juga memiliki biaya total terbesar dibandingkan dengan kedua usaha lainnya. Total biaya yang dikorbankan oleh usaha tipe non maklon untuk memproduksi satu ton beras mencapai

Rp 8.366.112,82. Biaya paling besar dikorbankan untuk memperoleh gabah sebagai input utama dalam aktivitas produksi, yaitu mencapai 92,32 persen dari total biaya.

Biaya pengadaan gabah merupakan komponen biaya terbesar pada aktivitas usaha penggilingan padi, yaitu melebihi 90 persen. Harga gabah yang tinggi akan berdampak positif dan signifikan pada tingginya biaya produksi usaha penggilingan padi. Oleh sebab itu, kebijakan pemerintah terhadap harga gabah dalam bentuk HPP dalam rangka melindungi petani kemudian akan berdampak pada peningkatan biaya usaha penggilingan padi dan sekaligus mempengaruhi struktur biaya usaha.

PENDAPATAN DAN IMBANGAN PENERIMAAN DAN BIAYA

Analisis pendapatan dan imbalan penerimaan dan biaya penggilingan padi dilakukan pada masing-masing usaha penggilingan padi kasus, yaitu usaha dengan tipe maklon, non maklon, dan gabungan. Analisis pendapatan dilakukan untuk melihat gambaran profitabilitas dari masing-masing usaha penggilingan padi. Sedangkan analisis imbalan penerimaan dan biaya (rasio R/C) dilakukan untuk melihat tingkat efisiensi usaha yang dilakukan oleh masing-masing usaha penggilingan padi kasus.

Ketiga usaha penggilingan padi tidak hanya menghasilkan beras sebagai output utama melainkan juga produk samping lainnya, seperti dedak, sekam, menir, dan *broken rice*. Persentase masing-masing hasil tersebut berbeda antara satu penggilingan dengan penggilingan lainnya. Harga produk samping (*side product*) diduga lebih stabil dibandingkan dengan harga beras.

Berikut disajikan tabel terkait pendapatan usaha ketiga usaha penggilingan padi. Komponen biaya kemudian disajikan sesuai seperti yang tertera pada tabel 1 sebelumnya. Selain itu, juga terdapat rasio R/C masing-masing usaha penggilingan padi.

Tabel 2. Pendapatan dan Imbangan Penerimaan dan Biaya Masing-Masing Usaha Penggilingan Padi Per Ton Beras yang Dihasilkan

Komponen	Maklon	%	Non Maklon	%	Gabungan	%
Penerimaan Usaha (Rp)						
Jasa penggilingan	350.000	76,37	-	-	62.500	0,72
Penjualan beras	-	-	8.960.000	82,55	7.200.000	83,26
Penjualan sekam	29.412	6,42	350.000	3,22	75.000	0,87
Penjualan dedak	78.857	17,21	363.750	3,35	405.000	4,68
Penjualan menir	-	-	300.000	2,76	210.000	2,43
Penjualan <i>broken rice</i>	-	-	879.938	8,11	694.688	8,03
Total Penerimaan	458.269	100,00	10.853.688	100,00	8.647.188	100,00
Total Biaya (Rp)	123.663	100,00	8.366.112	100,00	6.548.533	100,00
Pendapatan (Rp)	334.606	-	2.487.576	-	2.098.655	-
R/C	3,705	-	1,297	-	1,320	-
Proporsi Pendapatan						
Beras	-	-	839.865	33,76	528.475	25,18
<i>Side Product</i>	108.269	23,63	1.647.711	66,24	1.570.180	74,82

Sumber penerimaan yang diperoleh usaha penggilingan padi kasus berbeda-beda. Perbedaan tersebut tercermin dari aktivitas usaha yang dilaksanakan oleh masing-masing usaha penggilingan padi. Komponen penerimaan usaha tipe maklon terdiri atas tiga, yaitu upah jasa, penjualan sekam, dan penjualan dedak. Sumber penerimaan utama penggilingan padi tipe maklon berasal dari upah jasa, yaitu sekitar 76,37 persen. Sedangkan sekam dan dedak memberikan kontribusi sebesar 23,63 persen terhadap penerimaan usaha. Berbeda dengan usaha penggilingan padi tipe maklon, penerimaan terbesar usaha penggilingan padi tipe non maklon dan gabungan diperoleh dari hasil penjualan beras sebagai output utama. Berdasarkan Tabel 2 diketahui bahwa beras merupakan sumber penerimaan utama bagi usaha penggilingan padi tipe non maklon dan gabungan, yaitu mencapai 82,55 persen dan 83,26 persen dari total penerimaan. Sedangkan penyumbang kedua terhadap penerimaan kedua usaha tersebut adalah *broken rice*. Besarnya kontribusi beras dalam total penerimaan usaha menyebabkan adanya kebijakan pemerintah terhadap stabilisasi harga beras akan mengganggu keberlangsungan aktivitas usaha penggilingan.

Pada Tabel 3 terlihat bahwa penggilingan padi tipe non maklon memiliki pendapatan lebih besar dibandingkan dengan kedua

usaha lainnya. Akan tetapi, usaha ini memiliki nilai rasio R/C yang paling kecil, yaitu hanya 1,297. Artinya, usaha penggilingan padi tipe non maklon memiliki tingkat efisiensi yang lebih kecil dibandingkan dengan kedua usaha lainnya. Hal ini sesuai dengan apa yang telah diungkapkan oleh Nugraha (2008) bahwasanya usaha penggilingan padi kecil (PPK) memiliki tingkat efisiensi yang lebih besar dibandingkan dengan usaha penggilingan padi Besar (PPB).

Usaha tipe maklon diketahui memiliki tingkat efisiensi yang paling tinggi. Akan tetapi usaha penggilingan padi dengan tipe maklon ini tidak dapat memenuhi kebutuhan beras secara agregat karena kapasitas produksi yang sangat kecil. Hal ini menyebabkan kegiatan industri beras nasional tidak dapat hanya didukung oleh aktivitas usaha penggilingan padi tipe maklon semata. Oleh sebab itu, keberadaan usaha penggilingan padi tipe non maklon dan gabungan sangat dibutuhkan.

Rendahnya tingkat efisiensi usaha tipe non maklon dan gabungan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Salah faktor penyebabnya diduga karena keterbatasan pengelola dalam pengelolaan aset dan aktivitas usaha sedangkan diketahui kedua usaha ini memiliki ragam aktivitas yang menuntut manajemen yang lebih kompleks. Selain itu, kedua tipe usaha ini terpengaruh oleh fluktuasi harga

gabah maupun beras sehingga struktur penerimaan dan biaya usaha ini relatif tidak stabil dibandingkan dengan usaha tipe maklon.

Diketahui bahwa ketiga usaha penggilingan padi pada penelitian ini menerapkan manajemen *zero waste* pada semua hasil produksinya. *Zero waste* pada usaha penggilingan padi berarti bahwa tidak ada limbah dari usaha penggilingan padi yang tersisa sehingga semua output yang dihasilkan dapat dimanfaatkan dengan baik. Salah satu bentuk pemanfaatan output usaha penggilingan padi adalah dengan cara menjualnya sehingga memberikan tambahan pendapatan bagi usaha penggilingan padi.

Keuntungan yang diperoleh oleh usaha penggilingan padi tipe non maklon dan gabungan diketahui berasal dari dua komponen besar, yaitu beras dan produk samping (*side product*). Beras sebagai komponen penerimaan terbesar belum tentu menjadi sumber keuntungan utama usaha. Faktanya terlihat bahwa beras hanya mampu menyumbang 33,76 persen terhadap keuntungan usaha penggilingan padi tipe non maklon. Sisanya sebesar 66,24 keuntungan usaha berasal dari *side product*. Begitu pula dengan usaha penggilingan padi tipe gabungan, dimana beras hanya berkontribusi sebesar 25,18 persen terhadap keuntungan usaha, sedangkan sisanya diperoleh dari hasil penjualan produk samping. Hal ini membuktikan bahwa keberadaan industri pengolahan padi sangat bergantung pada produk samping (*side product*) bukan pada beras sebagai output utama. Banyak usaha penggilingan padi tidak menyadari hal ini sehingga hanya fokus kepada pengembangan beras sebagai output utama.

Walaupun persentase produk samping (*side product*) jauh lebih kecil dibandingkan beras sebagai output utama namun keberadaannya mampu menyokong keberlanjutan usaha pada usaha penggilingan padi kasus. Hal ini disebabkan karena saat ini produk samping tersebut telah memiliki nilai jual yang tidak dapat diabaikan begitu saja. Kemudian diketahui bahwa harga produk

samping, seperti sekam lebih stabil jika dibandingkan dengan harga beras selaku output utama. Selain itu, dengan memperhitungkan produk samping maka sebagian beban biaya yang ditanggung usaha kemudian juga dapat dibebankan kepada produk samping sehingga biaya produksi dapat diminimalisir.

SENSITIVITAS HARGA

Upaya usaha penggilingan padi untuk mendapatkan penerimaan maksimal dapat melalui berbagai cara, seperti peningkatan rendemen beras, penurunan harga gabah sebagai input, dan peningkatan harga beras yang dihasilkan. Peningkatan rendemen beras dapat dilakukan melalui peremajaan mesin penggilingan padi. Hal ini mungkin dilakukan oleh pelaku usaha mengingat hal tersebut merupakan sesuatu yang dapat dikendalikan oleh pelaku usaha.

Upaya peningkatan penerimaan usaha melalui penurunan harga gabah dan atau peningkatan harga beras sangat sulit dilakukan karena hal tersebut diluar kendali pelaku usaha. Seperti yang telah diketahui bahwa adanya pemerintah menetapkan kebijakan HPP gabah untuk melindungi petani kemudian berdampak kepada peningkatan biaya usaha penggilingan padi. Penurunan harga beras atau kebijakan lainnya yang berpengaruh terhadap penurunan harga beras bertujuan untuk melindungi konsumen kemudian akan berdampak pada penurunan penerimaan usaha penggilingan padi.

Analisis sensitivitas harga dapat dicontohkan pada satu kasus usaha, yaitu usaha tipe non maklon. Kenaikan harga gabah yang dapat ditoleransi adalah 9.81 persen dari harga pembelian gabah. Saat ini harga gabah yang dibeli adalah Rp 3.862,00 per kg GKP (di atas HPP). Jika harga ini meningkat sebesar 9.81 persen atau menjadi Rp 4281,93 per kg GKG maka usaha penggilingan padi berada di titik impas atau *break even point* (BEP). Sedangkan jika harga gabah berada di atas harga tersebut maka usaha penggilingan padi akan mengalami kerugian, *ceteris paribus*.

Penurunan harga beras yang dapat ditoleransi oleh usaha penggilingan padi tipe non maklon adalah 10,34 persen dari harga penjualan beras. Apabila harga beras turun sebesar 10,34 persen dari Rp 8.960,00 mejadi Rp 8.120,00 per kg beras maka usaha ini akan berada pada titik impasnya. Sedangkan, jika harga beras di bawah harga tersebut maka usaha penggilingan padi akan mengalami kerugian.

Penurunan harga beras tersebut diketahui mampu menurunkan tingkat profitabilitas usaha penggilingan padi. Turunnya harga beras dapat terjadi oleh mekanisme pasar beras. Selain itu, apabila beras yang dihasilkan usaha penggilingan padi dibeli oleh Bulog dengan harga sesuai dengan HPP, yaitu Rp 6.600,00 per kilogram diketahui akan menurunkan pendapatan usaha dan kemudian juga berdampak pada penurunan tingkat efisiensi usaha. Berdasarkan perhitungan, apabila beras sebagai output usaha dihargai sesuai HPP beras maka pendapatan usaha tipe non maklon hanya Rp 127.575,00 per ton beras, sedangkan pendapatan usaha tipe gabungan hanya Rp 178.658,00 per ton beras.

Sensitivitas harga gabah dan beras tersebut dapat digunakan oleh pemerintah untuk menentukan HPP gabah dan beras. Apabila pemerintah dapat mempertimbangkan sensitivitas harga tersebut maka pemerintah akan melahirkan kebijakan yang *better off* bagi produsen padi, pengusaha penggilingan padi, dan konsumen.

Fakta lainnya yang perlu dibahas adalah ternyata untuk memenuhi target produksi dan memenuhi kebutuhan pelanggan maka kedua usaha penggilingan padi (tipe non maklon dan gabungan) harus membeli beras. Artinya bahwa ketersediaan dan akses terhadap gabah menjadi kendala untuk memenuhi *demand* pelanggan yang dimiliki. Dalam satu bulan, usaha penggilingan padi tipe non maklon melakukan pembelian beras sebanyak 300 ton, sedangkan usaha penggilingan padi tipe gabungan membeli rata-rata 5 ton beras per bulan.

Beras yang dibeli kemudian diolah untuk dipasarkan kembali. Selain bertujuan untuk memenuhi pasokan beras yang dimiliki, upaya ini dilakukan sebagai pilihan lain untuk dapat meningkatkan pendapatan usaha. Menurut keterangan dari pelaku usaha, pembelian beras untuk diolah kembali memungkinkan pelaku usaha mendapatkan penerimaan yang lebih tinggi karena tingkat kehilangan hasil atau penyusutannya diduga hanya sekitar tiga persen. Hal ini disebabkan karena pengolahan kembali beras akan meningkatkan kualitas beras sehingga harga beras dapat meningkat.

KESIMPULAN

1. Komponen biaya terbesar usaha tipe maklon adalah biaya tenaga kerja sedangkan komponen penerimaan usaha terbesar berasal dari upah jasa penggilingan padi. Komponen biaya terbesar pada usaha penggilingan tipe non maklon dan gabungan adalah biaya pembelian gabah kering panen (GKP) yang mencapai 92,32 persen (non maklon) dan 91,87 persen pada (gabungan). Sedangkan komponen penerimaan utama pada kedua usaha tersebut berasal dari penjualan beras.
2. Ketiga usaha penggilingan padi memperoleh keuntungan dalam aktivitas produksinya. Namun, proporsi keuntungan terbesar usaha penggilingan padi tidak berasal dari penjualan beras (*main product*), akan tetapi berasal dari produk sampingan (*side product*), yaitu 66 persen pada usaha tipe non maklon dan 74 persen pada usaha tipe gabungan.
3. Berdasarkan analisis terhadap imbalan penerimaan dan biaya (rasio R/C) maka diketahui bahwa ketiga usaha penggilingan padi kasus telah efisien. Namun, penggilingan padi tipe maklon lebih efisien dibandingkan kedua usaha lainnya. Diduga pemilihan tipe maklon oleh suatu usaha merupakan bentuk penghindaran resiko harga. Tipe usaha

non maklon memiliki risiko yang tinggi dalam menghasilkan keuntungan yang besar karena sangat tergantung pada besar atau kecilnya harga input terutama harga gabah dan harga output yaitu beras.

4. Usaha penggilingan padi yang hanya fokus pada aktivitas penggilingan gabah menjadi beras dan kemudian menjual beras yang dihasilkan akan memperoleh pendapatan dan tingkat efisiensi usaha yang lebih rendah jika dibandingkan dengan usaha penggilingan padi yang juga fokus pada pengelolaan produk samping (*side product*), seperti sekam, dedak, menir, dan *broken rice*.
5. Harga gabah dan beras merupakan sesuatu yang di luar kendali pelaku usaha penggilingan padi. Kenaikan harga gabah yang dapat ditoleransi oleh pelaku usaha adalah sebesar 9,81 persen, sedangkan penurunan harga beras yang dapat ditoleransi adalah sebesar 10,34 persen atau minimal harga beras dijual dengan harga Rp 8.120,00 per kg beras. Oleh sebab itu, penetapan HPP beras sebesar Rp 6.600,00 per kg beras dapat merugikan usaha penggilingan padi.
6. Variabel kunci yang memengaruhi kinerja usaha penggilingan padi diduga terdiri atas tipe usaha, harga gabah kering panen, harga beras, dan manajemen pengelolaan produk samping (*side product*) produksi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri (BPKLN) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang telah memberikan Beasiswa Unggulan kepada penulis selama menyelesaikan pendidikan S2 di Program Studi Magister Sains Agribisnis, Institut Pertanian Bogor.

DAFTAR PUSTAKA

- Apriande, Cila. 2013. Efficiency Of Rice Milling Industry, Case Study : Two Sub-Districts in Cianjur Regency, West Java Province. [Thesis]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor.
- Badan Pusat Statistik. c2012. *Survei Sosial Ekonomi Nasional*. Jakarta : BPS.
- Kementerian Pertanian. 2012. Instruksi Presiden Republik Indonesia tentang Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras Oleh Pemerintah. http://bkp.deptan.go.id/tinymcpuk/gambar/file/Instruksi_Presiden_Nomor_3Tahun_2012_Tentang_Perberasan.pdf. (diakses 03 Feb 2013)
- Nugraha, Arif. 2008. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perbedaan Pendapatan dan Efisiensi Produksi Pada Perusahaan Penggilingan Padi di Kabupaten Karawang. Skripsi di Institut Pertanian Bogor, 203h.
- Patiwiri. Abdul W. 2004. Kondisi dan Permasalahan Pengolahan Padi di Indonesia. *Dalam: Prosiding Lokakarya Nasional; Upaya Peningkatan Nilai Tambah Pengolahan Padi*. Bogor: F-Technopark Fateta Institut Pertanian Bogor; p. 22-41
- Sawit MH, 2011. Reformasi Kebijakan Harga Produsen dan Dampaknya Terhadap Daya Saing Beras. *Jurnal Pengembangan Inovasi Pertanian* 4(1): 1-13. Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. www.pustaka.litbang.deptan.go.id
- Thahir, Ridwan. 2010. Revitalisasi Penggilingan Padi Melalui Inovasi Penyosohan Mendukung Swasembada Beras dan Persaingan Global. *Jurnal Pengembangan Inovasi Pertanian*. Vol.3 (3) : 171-183.
- USDA. 2012. Southeast Asia's Rice Surplus. A report from the economic research service. New York: United State Departemen of Agriculture [USDA]. www.ers.usda.gov

- Winarno. 2004. GMP dalam Industri Penggilingan Padi. Dalam: Rokhani H, Sutrisno, Tajuddin B, Abdul Waris, Haryadi Halid (ed). Dalam: *Prosiding Lokakarya Nasional; Upaya Peningkatan Nilai Tambah Pengolahan Padi*. Bogor: F-Technopark Fateta Institut Pertanian Bogor; p. 127-143
- Wongkeawchan J, Wiboonpongse A, Sriboonchitta S, Huang WT. 2000. Comparison of Technical Efficiency of Rice Mill Systems. In Thailand and Taiwan. Taiwan: Chiang Mai University

